

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KETAHANAN NASIONAL

Dadang Garnida^{*)}, Sjafri Mangkuprawira^{**)}, Bomer Pasaribu^{***)},
Aji Hermawan^{****)}

^{*)}Lemhanas Republik Indonesia

^{**)}Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

^{***)}DPR/MPR Republik Indonesia

^{****)}Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor

ABSTRACT

Leadership is a phenomenon of society, nation, and state which influence and characterize the life of society, nation, and state. Leadership is also one of all functions which can push both the realization of national ideas and national objectives, and national security and defense system. This research seeks for a strategic leadership model which can be implemented in all provinces in Indonesia, and which will influence all of provincial leaders, especially governors, in order to improve the strength of the National Security System (NSS). The collected quantitative and qualitative data were selected and analyzed descriptively and analitically by the use of descriptive analysis and multivariate regression, to meet the objective of this research. The result of this study shows that the leadership of a governor has a significant and positive influence upon national security and defense system and, therefore, it maybe concluded that a strong leadership of a governor will provide his local area with positive effect, namely, there will be an establishment of a strong and realiable system of national security and defense.

Keywords: Leadership, Province, Governor, National Security and Defense System, Multivariate Regression

ABSTRAK

Kepemimpinan merupakan fenomena kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang berpengaruh terhadap perkembangan corak dan arah kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kepemimpinan juga merupakan salah satu fungsi yang dapat mendorong terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional, serta Sistem Ketahanan Nasional (Sistannas). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Sistannas sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang kuat oleh Kepala Daerah akan memberikan dampak yang positif bagi daerahnya yaitu akan tercipta suatu Sistem Ketahanan Nasional yang kuat dan tangguh.

Kata kunci: Kewirausahaan, Kepemimpinan Kepala Daerah, Kinerja Daerah, Sistem Ketahanan Nasional

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kepemimpinan pada dekade terakhir ini dituntut untuk lebih memfokuskan bagaimana peran pemimpin dalam organisasi, sehingga akan membawa dampak positif terhadap organisasi. Kaitan antara kinerja organisasi dengan sumberdaya manusia dalam proses penyelenggaraan organisasi publik sesungguhnya bermuara pada kemampuan daerah untuk mempersiapkan jajaran birokrasi yang ada bagi penyelenggaraan pelayanan publik secara optimis dan berdaya guna. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi yang berbasis pada kemampuan daerah dengan memberikan pelayanan publik secara mandiri, terpadu, dan efektif.

Dampak-dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan berbagai konflik horizontal antar warga masyarakat seperti yang marak terjadi di beberapa daerah. Konflik-konflik tersebut akan berdampak pada kondisi Sistem Ketahanan Nasional yang telah ada. Achmad (2007) menjelaskan bahwa kondisi Ketahanan Nasional yang ada di daerah sangat bergantung pada hasil pembangunan daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah. Hasil pembangunan daerah yang baik dapat meningkatkan Ketahanan Nasional di daerah, dan sebaliknya bila hasil pembangunan daerah kurang baik, maka kondisi Ketahanan Nasional di daerah akan semakin rapuh. Achmad (2007) menambahkan bahwa jika diamati secara cermat tentang penyelenggaraan pembangunan di daerah selama ini, maka dapat diketahui bahwa hasil pengembangan yang telah dilaksanakan belum memenuhi keinginan masyarakat. Terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terus berlangsung serta konflik horizontal yang banyak disebabkan oleh fanatisme kedaerahan menjadi ancaman terhadap Ketahanan Nasional.

Menurut Kaloh (2009), salah satu karakteristik Kepala Daerah adalah tanggap terhadap kondisi politik, baik dalam organisasi pemerintahan maupun dalam masyarakat, serta memberikan jawaban atau tanggapan atas kritik, saran, dan mungkin juga pengawasan yang datangnya dari masyarakat, serta tanggap terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat. Seorang pimpinan pemerintah harus tanggap terhadap kondisi kelembagaan dalam arti memberikan perhatian serta tanggapan terhadap berbagai kebutuhan operasional dalam organisasi pemerintahan demi kelangsungan kehidupan organisasi pemerintahan.

Sejalan dengan itu, Tjokroamidjojo (1985), menyatakan bahwa seorang pimpinan pemerintah harus senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta kebutuhan dan kepentingan organisasi pemerintahan.

Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam organisasi khususnya dalam lingkup administrasi pemerintahan daerah. Hal ini ditunjang oleh pendapat Jyuj Misumi dalam Kaloh (2009) bahwa kepemimpinan merupakan subjek penting di dalam manajemen dan administrasi karena kepemimpinan terkait dengan saling hubungan antara atasan dan bawahan di dalam organisasi. Baik organisasi maupun kepemimpinan merupakan unsur administrasi. Dalam kaitan itu, Lepawsky dalam Kaloh (2009) melihat betapa pentingnya peranan administrasi karena administrasi memungkinkan berbagai organisasi pemerintahan memenuhi tanggungjawabnya dalam melaksanakan program-program dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana halnya pimpinan organisasi lainnya, Kepala Daerah juga dihadapkan pada berbagai keadaan dan tantangan dalam memimpin organisasi administrasi daerah. Keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh Kepala Daerah antara lain bagaimana mewujudkan otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab sebagai suatu paradigma baru, yang didukung oleh kualitas sumberdaya aparatur yang prima, sumberdaya alam, dan sumberdaya keuangan, serta sarana dan prasarana yang memadai, yang mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kehidupan masyarakat melalui program dan strategi pelayanan dan pemberdayaan (Kaloh, 2009).

Menyadari hal tersebut, menurut Kaloh (2009), Kepala Daerah sebagai pemimpin organisasi administrasi pemerintah daerah dituntut untuk bersikap proaktif dengan mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja dari para bawahannya. Di samping itu, Kepala Daerah juga harus mampu menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menjadi kreator, inovator, dan fasilitator dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Menurut Osborne dan Gaebler (1992), paradigma baru pemerintahan menuntut kegiatan nyata Kepala Daerah yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang kreatif, inovatif, perintisan, orientasi pelanggan/masyarakat, orientasi pelayanan dan pemberdayaan. Konsep tersebut juga menuntut kualitas Kepala Daerah sebagai pimpinan organisasi pemerintah daerah makin tinggi

pula, dimana seorang pimpinan tidak cukup hanya mengandalkan intuisi semata, tetapi harus didukung oleh kemampuan intelektual dan keahlian yang memadai, ketajaman visi, serta kemampuan etika dan moral yang beradab. Memahami beratnya tugas dan tanggungjawab Kepala Daerah, sehingga tidak heran bila pejabat tersebut dituntut oleh persyaratan kualitas yang cukup berat (Riwu Kaho, 1988).

Deskripsi tentang kepemimpinan Kepala Daerah di atas menunjukkan urgensi dan eksistensi kepemimpinan Kepala Daerah dalam mewujudkan tujuan organisasi administrasi pemerintahan daerah dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintah provinsi, kepemimpinan Kepala Daerah ikut menentukan keberhasilan organisasi administrasi pemerintahan daerah. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari beberapa kriteria, antara lain semakin berkurangnya angka kemiskinan, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat kesehatan, yang merupakan perkembangan dalam berbagai indikator lainnya, seperti *human development index*, angka pertumbuhan ekonomi, angka kematian bayi, dan banyak lagi indikator lainnya. Untuk mewujudkan keberhasilan tersebut, Kepala Daerah memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan setiap anggota masyarakat dan seluruh aparatur untuk meraih keberhasilan tersebut.

Untuk itu, menurut Muladi dan Sujatno (2009), kepemimpinan merupakan fenomena kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang berpengaruh terhadap perkembangan corak dan arah kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kepemimpinan juga merupakan salah satu fungsi yang dapat mendorong terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional, serta Sistem Ketahanan Nasional. Penelitian ini mencoba meneliti pengaruh dari kepemimpinan Kepala Daerah dalam mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional di Indonesia sehingga nantinya dapat dihasilkan suatu rekomendasi berupa strategi kepemimpinan yang efektif dalam rangka mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional yang tangguh.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Sistem Ketahanan Nasional di tujuh propinsi yang menjadi lokasi penelitian ini?
2. Bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala Daerah terhadap Sistem Ketahanan Nasional?
3. Bagaimana strategi kepemimpinan yang efektif dalam rangka mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Sistem Ketahanan Nasional di tujuh propinsi yang menjadi lokasi penelitian ini.
2. Menganalisis pengaruh kepemimpinan Kepala Daerah terhadap Sistem Ketahanan Nasional
3. Merumuskan strategi kepemimpinan yang efektif dalam rangka mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan tambahan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan penerapan konsep kepemimpinan oleh Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada peran kepemimpinan Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional. Kepala Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Gubernur yang merupakan pimpinan eksekutif tertinggi tingkat provinsi yang memimpin dan mengarahkan seluruh sumberdaya dan potensi daerahnya untuk mencapai kinerja terbaik dalam rangka memajukan pembangunan di daerah.

Jumlah provinsi yang menjadi lokasi penelitian adalah tujuh provinsi yang dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa tujuh provinsi tersebut mampu mewakili keseluruhan provinsi di Indonesia. Selain itu, para Gubernur yang akan dinilai adalah para Gubernur yang mulai menjabat sebagai Gubernur sejak tahun 2006 atau tahun-tahun sebelumnya dan saat ini masih menjabat sebagai Gubernur. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa masa kepemimpinan para Gubernur tersebut sudah berlangsung selama minimal empat tahun, sehingga layak untuk dinilai keberhasilannya dalam memimpin daerah selama periode tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di tujuh provinsi di Indonesia, yang meliputi Lampung, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Penelitian berlangsung selama empat bulan yakni pada bulan November 2009 sampai dengan bulan Februari 2010.

Desain penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran, informasi, penjelasan, dan kondisi terkini yang berkaitan dengan kepemimpinan Kepala Daerah dan Sistem Ketahanan Nasional. Selain itu, desain ini bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh kepemimpinan Kepala Daerah terhadap Sistem Ketahanan Nasional.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mendalam dengan para responden. Sementara, data sekunder diperoleh dari pemerintah daerah, instansi atau organisasi terkait, perpustakaan, internet, dan media massa berupa laporan, buku, artikel, serta literatur-literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dan wawancara mendalam dengan cara mendatangi responden ke lokasi penelitian. Sebelumnya, kuesioner disebar kepada responden melalui pos (*mail questionnaire*) mencakup pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur variabel kepemimpinan Kepala Daerah dan Sistem Ketahanan Nasional. Selanjutnya, saat berkunjung ke lokasi penelitian, dilakukan wawancara mendalam dengan para responden untuk menindaklanjuti hasil pengisian kuesioner.

Teknik pengambilan contoh yang digunakan adalah purposive sampling. Melalui teknik ini pemilihan responden didasarkan atas pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan pemahamannya kepemimpinan Kepala Daerah dan Sistem Ketahanan Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, maka responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah para Gubernur, para Wakil Gubernur, para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), para Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), para Inspektur Provinsi, para Staf Gubernur, dan para tokoh masyarakat.

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka diperlukan teknik analisis yang tepat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat tiga alat analisis sebagai berikut:

1. Analisis Rataan Skor

Analisis rata-rata skor digunakan untuk mengetahui persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan peneliti kepada responden. Hasil analisis ini berupa angka/nilai rata-rata persepsi responden mengenai variabel kepemimpinan Kepala Daerah dan Sistem Ketahanan Nasional beserta

indikator-indikatornya. Hasil tersebut kemudian akan dibandingkan dengan rentang kriteria yang telah dibentuk sehingga dapat diketahui kondisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Sistem Ketahanan Nasional di lokasi penelitian. Pengolahan rata-rata skor ini menggunakan bantuan Microsoft Excell 2007.

2. Analisis of Variance (ANOVA)

Analisis of variance atau ANOVA merupakan uji beda nyata statistik untuk mengetahui perbedaan persepsi responden terhadap kepemimpinan Kepala Daerah dan Sistem Ketahanan Nasional berdasarkan provinsi. Pengujian ini menggunakan distribusi F dan pengujian dilakukan searah atas.

Pada uji ini, akan dilihat nilai signifikansi atau *p-value*, dimana jika $p\text{-value} < 0,05$ (5%) maka tolak H_0 yang artinya terdapat perbedaan persepsi responden mengenai variabel kepemimpinan Kepala Daerah dan Sistem Ketahanan Nasional berdasarkan provinsi. Pengolahan ANOVA ini menggunakan bantuan *Minitab* 14.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Agar hasil yang diperoleh tidak bias, maka asumsi-asumsi yang mendasari penggunaan teknik regresi berganda harus dipenuhi, yaitu :

- (1) adanya normalitas data
- (2) adanya homoskedastisitas
- (3) tidak ada hubungan antar variabel independen dan
- (4) tidak ada autokorelasi atau korelasi antar error

Normalitas data dapat diuji secara langsung dengan teknik plot terhadap variabel penelitian sehingga dapat dicek langsung apakah penyebaran skornya mengikuti distribusi normal atau tidak. Untuk menguji adanya homoskedastisitas atau tidak adanya gejala heteroskedastisitas, dilakukan analisis residual dengan ketentuan bahwa penyebaran residual bersifat *random*, tidak berkorelasi dengan variabel independen. Untuk menjamin ada tidaknya multikolinearitas, digunakan uji statistik *collinearity* dengan ketentuan nilai VIF (*variance inflation factor*) tidak boleh melebihi angka lima atau 10, karena jika nilai VIF tidak lebih dari 5 atau 10, maka taksiran parameter dapat dikatakan cukup baik. Sementara untuk menguji apakah ada autokorelasi atau tidak, digunakan tes Durbin Watson dengan ketentuan apabila nilai Durbin Watson hasil perhitungan terletak di antara 1,65 sampai 2,35, maka tidak ada gejala autokorelasi, sedangkan kalau diluar dari rentangan tersebut, maka ada tidaknya autokorelasi tidak dapat disimpulkan.

Untuk melakukan pengujian hipotesis sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, digunakan koefisien regresi, yang menunjukkan berapa besar perubahan pada variabel dependen dijelaskan oleh setiap perubahan dari masing-masing variabel independen, dengan nilai t dan tingkat signifikansi tertentu (nilai t hitung harus lebih besar dari t tabel, yaitu 1,645; dan tingkat signifikansi hitung harus lebih kecil dari tingkat signifikansi standar yaitu 0,1 atau 10%). Untuk menguji pengaruh relatif variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan koefisien β (*beta*) yang distandarisasikan (*standardized Beta*), yang menunjukkan besarnya perubahan pada variabel dependen yang dihasilkan oleh satu unit perubahan pada variabel independen, yang diukur dalam bentuk standar deviasi. Ketepatan dari model-model yang digunakan di sini diuji dari besarnya koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai R^2 dan tingkat signifikansi yang ditunjukkan dari nilai F (tingkat signifikansi nilai F hitung harus lebih kecil dari signifikansi nilai F standar, yaitu 0,1). Hasil analisis kuantitatif ini dilengkapi dengan hasil kualitatif dengan wawancara mendalam, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, untuk memberikan penjelasan yang riil tentang bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala Daerah terhadap Sistem Ketahanan Nasional. Semua pengolahan data dan interpretasi hasil dilakukan dengan menggunakan program Minitab 14.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Sistem Ketahanan Nasional

Tabel 1 memperlihatkan bahwa persepsi responden terhadap kepemimpinan Kepala Daerah dan Sistem Ketahanan Nasional (Sistannas) di masing-masing provinsi secara rata-rata adalah sangat baik, dan tangguh. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kepemimpinan Kepala Daerah saat ini sudah sangat baik. Begitu pula dengan Sistem Ketahanan Nasional

Tabel 1. Kondisi Kewirausahaan, Kepemimpinan, Kinerja Daerah, dan Sistem Ketahanan Nasional di Masing-masing Provinsi

| Provinsi | Kepemimpinan Kepala Daerah | | Sistem Ketahanan Nasional | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|---------|
| | Skor | Kondisi | Skor | Kondisi |
| Lampung | 4,67 | Sangat Baik | 4,00 | Tangguh |
| Banten | 4,20 | Baik | 3,80 | Tangguh |
| Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) | 4,46 | Sangat Baik | 3,92 | Tangguh |
| Kalimantan Tengah | 4,67 | Sangat Baik | 4,11 | Tangguh |
| Sulawesi Utara | 4,29 | Sangat Baik | 4,00 | Tangguh |
| Maluku | 4,70 | Sangat Baik | 4,00 | Tangguh |
| Papua | 4,67 | Sangat Baik | 3,78 | Tangguh |

yang pada saat ini berada dalam kondisi yang tangguh. Berdasarkan Tabel 1 dapat juga dilihat bahwa provinsi-provinsi yang mana Kepala Daerahnya memiliki Berdasarkan Tabel 1 dapat juga dilihat bahwa provinsi-provinsi yang mana Kepala Daerahnya memiliki kepemimpinan yang sangat baik dan baik, juga memiliki Sistannas yang tangguh. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan Kepala Daerah memiliki peran yang besar bagi tercapainya Sistannas yang tangguh.

Hasil olahan data dengan program Minitab 14 seperti yang terlihat pada Tabel 3 menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi yaitu 96,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan Kepala Tabel 1 juga memperlihatkan bahwa provinsi Maluku merupakan provinsi yang Kepala Daerahnya memiliki kepemimpinan yang paling baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata skor tertinggi yang diperoleh provinsi Maluku, dimana nilai rata-rata skor kepemimpinan adalah 4,70. Hal ini mengindikasikan bahwa Gubernur Maluku saat ini telah memiliki kepemimpinan yang sangat baik dan hal tersebut sangat membantunya dalam bekerja untuk memajukan provinsinya dan mewujudkan Sistannas yang tangguh di daerahnya.

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 dapat juga dilihat bahwa pada provinsi Lampung, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalteng, Sulut, dan Papua, para Kepala Daerahnya memiliki kepemimpinan yang sangat baik dan baik. Demikian pula dengan kondisi Sistannas di enam provinsi tersebut yang berada dalam kondisi tangguh. Hal ini cukup menarik untuk dicermati bahwa apakah ada hubungan antara kepemimpinan yang sangat baik dengan Sistannas yang tangguh.

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Daerah terhadap Sistem Ketahanan Nasional

Setelah sebelumnya melakukan analisis persepsi terhadap kepemimpinan Kepala Daerah dan Sistannas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis

Tabel 2. Kondisi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Sistem Ketahanan Nasional serta Indikator-indikatornya di Masing-masing Provinsi

| Provinsi | Kepemimpinan Kepala Daerah | | | | Sistem Ketahanan Nasional | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | MAP | MAS | MAI | MAG | GE | DE | SK | ID | PO | EK | SB | PK |
| Lampung | 4,08 | 4,67 | 4,42 | 4,67 | 4,50 | 3,25 | 3,50 | 4,08 | 3,67 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Banten | 4,10 | 4,10 | 4,30 | 4,50 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 4,30 | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 3,90 |
| DIY | 4,46 | 4,46 | 4,38 | 4,69 | 4,23 | 3,38 | 3,46 | 4,31 | 4,00 | 3,54 | 3,92 | 3,92 |
| Kalimantan Tengah | 4,44 | 4,67 | 4,67 | 4,56 | 4,33 | 3,56 | 4,33 | 4,33 | 4,00 | 3,89 | 4,00 | 4,11 |
| Sulawesi Utara | 4,07 | 4,29 | 4,43 | 4,43 | 4,64 | 3,50 | 3,64 | 4,36 | 4,07 | 4,00 | 3,86 | 4,07 |
| Maluku | 4,40 | 4,70 | 4,70 | 4,60 | 4,60 | 3,60 | 3,90 | 4,40 | 3,80 | 3,40 | 3,80 | 3,90 |
| Papua | 4,56 | 4,78 | 4,67 | 4,89 | 4,44 | 4,33 | 4,00 | 4,00 | 3,56 | 2,00 | 3,56 | 3,44 |
| Rataan | 4,30 | 4,52 | 4,51 | 4,62 | 4,46 | 3,52 | 3,83 | 4,25 | 3,87 | 3,55 | 3,86 | 3,91 |
| Kondisi | SB | SB | SB | SB | SB | B | B | SB | B | B | B | B |

Keterangan: MAP = Moralitas dan Akuntabilitas Individu, MAS = Moralitas Dan Akuntabilitas Sosial, MAI = Moralitas dan Akuntabilitas Institusional, MAG = Moralitas dan Akuntabilitas Global, GE = Gatra Geografi, DE = Gatra Demografi, SK = Gatra Sumber Kekayaan Alam, ID = Gatra Ideologi, PO = Gatra Politik, EK = Gatra Ekonomi, SB = Gatra Sosial Budaya, PK = Gatra Pertahanan Keamanan, B = Baik, SB = Sangat Baik

pengaruh variabel kepemimpinan Kepala Daerah terhadap Sistannas, sehingga dapat dibuktikan secara statistik apakah terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari kepemimpinan Kepala Daerah terhadap Sistannas. Teknik analisis yang dipakai adalah teknik analisis regresi linier dengan bantuan software *Minitab* 14.

Daerah mampu menjelaskan variasi yang terdapat pada variabel Sistannas sebesar 96,9%, sementara 3,1% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel kepemimpinan Kepala Daerah.

Hasil ANOVA menunjukkan bahwa model ini dapat diandalkan sebagai model linier yang signifikan dalam memprediksi Sistannas. Nilai F hitung sebesar 156,7 dengan p-value 0,000 yang nilainya lebih kecil dari taraf nyata 5% menunjukkan bahwa model dengan variabel pengaruh kepemimpinan Kepala Daerah mampu menjelaskan Sistannas secara linier. Besarnya koefisien regresi 1,06 mengandung arti bahwa setiap perubahan 100% pada kepemimpinan Kepala Daerah maka Sistem Ketahanan Nasional berubah 106%. Artinya, jika Gubernur memperkuat karakter kepemimpinannya dalam menjalankan semua tugas, maka Sistem Ketahanan Nasional akan mengalami peningkatan sebesar 106%.

Hasil statistik di atas sejalan dengan pernyataan Muladi dan Sujatno (2009) bahwa kepemimpinan merupakan fenomena kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang berpengaruh terhadap perkembangan corak dan arah kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kepemimpinan juga merupakan salah satu fungsi yang dapat mendorong terwujudnya cita-

cita dan tujuan nasional, serta Sistem Ketahanan Nasional. Aspirasi yang berkembang dalam masyarakat timbul karena adanya interaksi antara pemimpin dan pengikutnya. Hubungan interaksi tersebut dapat terjadi (Muladi dan Sujatno, 2009).

Untuk mengetahui lebih dalam tentang pengaruh variabel kepemimpinan Kepala Daerah terhadap Sistem Ketahanan Nasional, diperlukan suatu elaborasi khusus tentang pengaruh indikator-indikator kepemimpinan Kepala Daerah terhadap Sistem Ketahanan Nasional. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui indikator-indikator kepemimpinan mana yang berpengaruh signifikan terhadap Sistem Ketahanan Nasional (Sistannas). Teknik analisis yang dipakai adalah teknik analisis regresi berganda dengan bantuan *software Minitab* 14.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda

| Variabel Independen | | Koefisien Regresi | p-value | F |
|----------------------------|-------|-------------------|---------|-------|
| Kepemimpinan Kepala Daerah | | 1,06 | 0,000 | |
| R ² | 96,9% | | | 156,7 |

Keterangan: * signifikan pada α 0,05
Variabel Dependen Sistem Ketahanan Nasional

Adapun hipotesis yang diuji, yaitu:

- H1: kepemimpinan Kepala Daerah dan indikator-indikatornya secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Sistannas.
- H1: kepemimpinan Kepala Daerah berpengaruh signifikan terhadap Sistannas.
- H1: Moralitas dan Akuntabilitas Individu (MAP) berpengaruh signifikan terhadap Sistannas.

- d. H1: Moralitas dan Akuntabilitas Sosial (MAS) berpengaruh signifikan terhadap Sistannas.
- e. H1: Moralitas dan Akuntabilitas Institusional (MAI) berpengaruh signifikan terhadap Sistannas.
- f. H1: Moralitas dan Akuntabilitas Global (MAG) berpengaruh signifikan terhadap Sistannas.

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan Minitab 14, diperoleh hasil sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4. Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 99,9% yang artinya 99,9% variasi yang dihasilkan oleh Sistem Ketahanan Nasional berhasil dijelaskan oleh indikator-indikator kepemimpinan Kepala Daerah. Selain itu, dalam model regresi ini tidak terdapat gejala autokorelasi karena nilai Durbin Watson adalah 2,28, terletak di antara 1,65 dan 2,35 sehingga tidak ada kekhawatiran akan adanya autokorelasi yang dapat mengganggu ketepatan memprediksi atau mengeksplanasi variabel Sistem Ketahanan Nasional.

Hasil ANOVA menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh signifikan pada 0,001 yang berarti kelinieran model ini dapat dijamin. Artinya model dengan indikator-indikator kepemimpinan Kepala Daerah dapat digunakan untuk memprediksi Sistem Ketahanan Nasional secara linier.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Berganda

| Variabel | | Koefisien Regresi | p-value | F |
|---|-------|-------------------|---------|--------|
| Moralitas dan Akuntabilitas Individu | | 0,09712 | 0,295 | |
| Moralitas dan Akuntabilitas Sosial | | 0,61677 | 0,017 | |
| Moralitas dan Akuntabilitas Institusional | | -0,46677 | 0,041 | |
| Moralitas dan Akuntabilitas Global | | 0,62015 | 0,015 | |
| R2 | 99,9% | | | 843,03 |

Keterangan: * signifikan pada α 0,1

Variabel Dependen Sistem Ketahanan Nasional

Hasil analisis regresi berganda memperlihatkan bahwa terdapat 3 variabel independen yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Sistem Ketahanan Nasional, yaitu moralitas dan akuntabilitas sosial (MAS) moralitas dan akuntabilitas institusional (MAI), serta moralitas dan akuntabilitas global (MAG). Hal ini dikarenakan nilai signifikansi (*p-value*) yang diperoleh oleh ketiga variabel tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi standar 0,05 (5%). Dengan melihat tanda positif pada koefisien regresi yang ada, maka dapat dikatakan bahwa

MAS dan MAG berpengaruh positif dan merupakan faktor penguat bagi Sistem Ketahanan Nasional.

Berdasarkan hasil regresi berganda di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang kuat pada aspek MAS dan MAG oleh Gubernur di daerah akan memberikan dampak yang positif bagi daerahnya yaitu akan tercipta suatu Sistem Ketahanan Nasional yang kuat sehingga apabila kondisi tersebut dapat tercapai, maka kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah akan dapat terwujud. Atau dengan kata lain, semakin baik MAS dan MAG Gubernur, maka akan semakin tangguh dan kuat Sistem Ketahanan Nasional.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa saat ini kekuatan kepemimpinan Gubernur pada aspek etika dan moral, serta tanggungjawab terhadap lingkungan sosial dan global berdampak positif terhadap Sistannas. Kemampuan para Gubernur dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara baik dengan lingkungan sekitarnya dalam rangka penyerapan aspirasi, dapat membangun simpati dan dapat diterima oleh masyarakat yang dipimpinnya, memiliki tingkat dukungan lintas partai/golongan dalam rangka membangun koalisi yang signifikan ternyata berakibat positif terhadap terciptanya Sistannas yang tangguh.

Selain itu, pengetahuan dan wawasan regional dan global dengan semangat membangun kepemimpinan bersama, pemahaman dan konsistensi wawasannya dalam politik luar negeri yang bebas aktif, memiliki karakter negarawan yang karya dan kepribadiannya dihormati oleh negara lain, serta mampu meningkatkan kedudukan Indonesia di mata internasional dengan tidak mengorbankan jati diri nasional dalam menghadapi proses globalisasi juga merupakan hal-hal yang menjadi kekuatan utama dalam kepemimpinan Gubernur dalam rangka mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional yang tangguh.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para responden, para Gubernur saat ini telah berhasil membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat daerah. Intensitas Gubernur untuk terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat cukup tinggi sehingga Gubernur dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat di daerahnya, mengetahui secara langsung dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga sangat membantunya dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk menyejahterakan masyarakat daerahnya. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Gubernur selaku Kepala Daerah yang telah dipilih langsung oleh rakyatnya di daerah.

Selain itu, para Gubernur saat ini juga telah melakukan terobosan-terobosan baru untuk memajukan daerahnya. Berbagai bentuk kerjasama dengan pihak investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri telah dilakukan dalam upaya optimalisasi potensi dan sumber kekayaan daerah. Meskipun demikian, para Gubernur tetap menjaga agar kelestarian lingkungan dan kebudayaan masyarakat setempat tidak terganggu oleh berbagai proyek kerjasama pemerintah daerah dengan pihak asing.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil pemikiran Muladi dan Sujatno (2009) bahwa sistem kepemimpinan nasional (termasuk kepemimpinan Kepala Daerah) harus bersumber dan berkembang dari paradigma nasional yang bermuara pada nilai-nilai moral dan etika kepemimpinan, dan terkendali dengan gaya dan orientasi kepemimpinan, serta tanggap terhadap perkembangan lingkungan strategis, baik internal (nasional dan lokal) maupun eksternal (regional dan global). Oleh karena itu, visi, misi, strategi, dan orientasi kepemimpinan nasional/daerah haruslah menjadi sentra sistem pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional (Muladi dan Sujatno, 2009).

IMPLIKASI MANAJERIAL

Berdasarkan hasil penelitian di tujuh provinsi di Indonesia, yakni Lampung, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua dengan menggunakan analisis rataan skor, dapat diketahui bahwa kondisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Sistem Ketahanan Nasional masing-masing adalah sangat baik dan tangguh. Kepala Daerah yang memiliki kepemimpinan yang sangat baik, ternyata juga Sistannas yang tangguh.

Sementara itu, uji statistik dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda memperlihatkan bahwa kepemimpinan Kepala Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Sistem Ketahanan Nasional. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang kuat oleh Gubernur di daerah akan memberikan dampak yang positif bagi daerahnya yaitu akan tercipta suatu Sistem Ketahanan Daerah yang kuat dan tangguh. Selain itu, dari empat indikator kepemimpinan Kepala Daerah hanya dua indikator yang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Sistannas yaitu moralitas dan akuntabilitas sosial (MAS) dan moralitas dan akuntabilitas global (MAG).

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat direkomendasikan kepada para Kepala Daerah bahwa kepemimpinan

Kepala Daerah pada aspek MAS dan MAG perlu lebih diperkuat karena akan berdampak positif terhadap ketangguhan Sistem Ketahanan Nasional (Sistannas). Hasil analisis regresi berganda tersebut dikombinasikan dengan hasil analisis rataan skor, sehingga menghasilkan suatu implikasi manajerial berupa strategi kepemimpinan Kepala Daerah yang dapat digunakan untuk memperkuat dan meningkatkan ketangguhan Sistannas.

Penguatan karakter kepemimpinan Kepala Daerah pada aspek moralitas dan akuntabilitas sosial (MAS) dan aspek moralitas dan akuntabilitas global (MAG) sangat penting dilakukan karena akan mampu mewujudkan Sistannas yang tangguh. Untuk itu, Gubernur harus mampu memperkuat karakter-karakter kepemimpinan sebagai berikut:

- mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara baik dengan lingkungan sekitarnya dalam rangka penyerapan aspirasi.
- dapat membangun simpati dan dapat diterima oleh masyarakat yang dipimpinnya.
- selalu bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya.
- profesional atas dasar ekspertis, rasa tanggungjawab sosial dan kebersamaan atas dasar kode etik yang berlaku.
- dapat membangun solidaritas dan menumbuhkan harapan baru untuk kemajuan yang lebih baik.
- memiliki semangat dan kemampuan untuk menciptakan kader.
- kehadirannya selalu lebih bersifat fungsional dari semata-mata simbolik.
- mampu menggali karakter kepemimpinan yang bersumber dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia.
- kedudukannya yang menonjol dalam survei akseptabilitas.
- tingkat dukungan lintas partai/golongan dalam rangka membangun koalisi yang signifikan.
- meningkatkan wawasan regional dan global dengan semangat membangun kepemimpinan bersama.
- selalu menjaga semangat kemitraan dengan menghormati keragaman budaya.
- meningkatkan pemahaman dan konsistensi wawasannya dalam politik luar negeri yang bebas aktif.
- meningkatkan karakter negarawan yang karya dan kepribadiannya dihormati oleh negara lain.
- mampu meningkatkan kedudukan Indonesia di mata internasional dengan tidak mengorbankan jati diri nasional dalam menghadapi proses globalisasi.
- meningkatkan kesadaran terhadap bahaya keamanan yang komprehensif, baik bahaya tradisional yang membahayakan negara maupun bahaya non tradisional yang membahayakan umat manusia.

Untuk memperkuat kepemimpinannya dalam rangka menciptakan Sistem Ketahanan Nasional, para Gubernur memerlukan strategi pokok kepemimpinan. Strategi pokok kepemimpinan yang dapat dipilih terkait dengan penguatan aspek MAS dan MAG adalah memperluas partisipasi politik dan penggunaan politik luar negeri.

Strategi pokok memperluas partisipasi politik sangat relevan dengan pencapaian sasaran transformasi sosial, dan juga dalam rangka melaksanakan demokratisasi sesuai agenda reformasi serta sebagai sikap proaktif menghadapi tuntutan global. Strategi politik luar negeri yang menganut politik luar negeri yang bebas aktif telah secara konsisten dianut oleh NKRI sejak awal kemerdekaan sampai saat ini perlu diaktualisasikan. Strategi ini konsisten dengan tujuan nasional dan meningkatkan peran aktif Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai salah satu subsistem dunia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Persepsi responden terhadap kepemimpinan Kepala Daerah dan Sistem Ketahanan Nasional (Sistannas) di masing-masing provinsi adalah sangat baik dan tangguh. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kepemimpinan Kepala Daerah saat ini sudah sangat baik. Begitu pula dengan Sistem Ketahanan Nasional yang pada saat ini berada dalam kondisi yang tangguh.
2. Kepemimpinan Kepala Daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Sistannas sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang kuat oleh Gubernur di daerah akan memberikan dampak yang positif bagi daerahnya yaitu akan tercipta suatu Sistem Ketahanan Nasional yang kuat dan tangguh.
3. Model dengan indikator-indikator kepemimpinan Kepala Daerah dapat digunakan untuk memprediksi Sistem Ketahanan Nasional secara linier karena berdasarkan hasil analisis regresi berganda model dengan variabel independen indikator-indikator kepemimpinan Kepala Daerah secara bersama-sama mampu berpengaruh signifikan terhadap Sistem Ketahanan Nasional. Selain itu, ketika dianalisis secara individu, terdapat dua variabel independen yang memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Sistannas, yaitu moralitas dan akuntabilitas sosial (MAS) dan moralitas dan akuntabilitas global (MAG). Hal ini mengandung arti bahwa kepemimpinan yang kuat pada aspek MAS dan MAG oleh para Gubernur di daerah akan memberikan dampak yang positif bagi daerahnya yaitu akan tercipta suatu Sistem Ketahanan Nasional

yang kuat sehingga apabila kondisi tersebut dapat tercapai, maka kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah akan dapat terwujud. Atau dengan kata lain, semakin baik MAS dan MAG Gubernur, maka akan semakin tangguh dan kuat Sistem Ketahanan Nasional.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang meneliti kepemimpinan dari beberapa Gubernur di Indonesia dalam kaitannya dengan upaya untuk mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional yang tangguh sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan rangsangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan mampu menggali lebih mendalam dan komprehensif mengenai kepemimpinan Gubernur di masing-masing provinsi.
2. Penelitian selanjutnya mengenai Sistem Ketahanan Nasional juga perlu dilakukan agar diperoleh upaya-upaya yang konkrit dan lengkap untuk menciptakan Sistem Ketahanan Nasional yang lebih tangguh.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. 2007. Meningkatkan Ketahanan Nasional dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mendorong Pembangunan Nasional dalam Rangka Keutuhan NKRI. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Ali, S. 2007. Kepemimpinan. Bahan Ceramah Diklatpim Tingkat II Angkatan XX LAN.
- Cerrick, SHM. 2004. Strategi Kepemimpinan Nasional di Era Keterbukaan. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Charan, R. 2007. Know How Delapan Keterampilan Yang Menjadi Ciri Pemimpin Sukses. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Danim, S. 2004. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hicks, H dan R Gullet. 1996. Kepemimpinan Efektif. Jakarta.
- Tjokroamidjojo, B. 1985. Pengantar Administrasi Pembangunan. Lembaga Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial. Jakarta.
- Yukl, G. A. 2002. Leadership in Organization. Prentice-Hall. New Jersey.
- Husen, M. 2008. Aktualisasi Nilai-nilai Kepemimpinan Guna Mempercepat Pencapaian Pembangunan Nasional Dalam Rangka Penyelenggaraan

- Negara. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Kaho, Y. R. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2009. *IKNI: Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (Konsep dan Implementasi)*. Galuh. Jakarta.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2008. *Modul Mata Kuliah Ketahanan Nasional*. Jakarta.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2006. *Figura Tokoh Pembaharu Lemhannas Edisi IV tahun 2006*. Jakarta.
- Markus, YJ. 2008. *Revitalisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Di Daerah*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Muladi dan E. Sujatno. 2009. *Traktat Etis Kepemimpinan*. Galuh. Jakarta.
- Nawawi, H. 2003. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Osborne, D. dan T Gaebler . 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley, Reading, MA.
- Purwanto, PD. 2007. *Aktualisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan dan Peran Pemimpin Guna Berhasilnya Otonomi Daerah dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional*. Kertas Karya Perorangan. Program Pendidikan Reguler Angkatan-XL Lembaga Ketahanan Nasional RI. Jakarta.
- Welch, S. dan J.C. Comer. 1988. *Quantitative Methods for Public Administration: Techniques and Application*. Homewood, Illinois. The Dorsey Press.